



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Penolakan Kamboja terhadap Pembentukan Posisi
Bersama ASEAN terkait Isu Laut China Selatan dalam
*ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) ke-45, Juli
2012***

Skripsi

Oleh

Bobby Hizkia

2014330037

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Penolakan Kamboja terhadap Pembentukan Posisi
Bersama ASEAN terkait Isu Laut China Selatan dalam
*ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) ke-45, Juli
2012***

Skripsi

Oleh

Bobby Hizkia

2014330037

Pembimbing

Yulius Purwadi Hermawan, Drs., M.A., Ph.D.

Bandung

2017



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

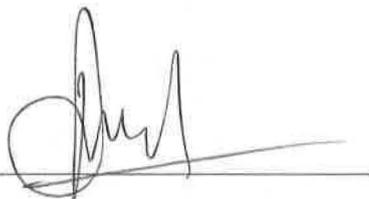


Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Bobby Hizkia
Nomor Pokok : 2014330037
Judul : Penolakan Kamboja terhadap Pembentukan Posisi
Bersama ASEAN terkait Isu Laut China Selatan dalam
*ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) ke-45, Juli
2012*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 19 Desember 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

: 

Sekretaris
Yulius Purwadi Hermawan, Drs., M.A., Ph.D.

: 

Anggota
Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bobby Hizkia
NPM : 2014330037
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Penolakan Kamboja terhadap Pembentukan Posisi Bersama ASEAN terkait Isu Laut China Selatan dalam *ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM)* ke-45, Juli 2012

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Desember 2017



ABSTRAK

Nama : Bobby Hizkia
NPM : 2014330037
Judul : Penolakan Kamboja terhadap Pembentukan Posisi Bersama ASEAN terkait Isu Laut China Selatan dalam *ASEAN Foreign Ministers Meeting* (AMM) ke-45, Juli 2012

Pada tahun 2012, dunia internasional dikejutkan oleh tidak dihasilkannya komunikasi bersama pada AMM ke-45 untuk pertama kali dalam 45 tahun berdirinya ASEAN. Dalam peristiwa yang disebut sebagai "*Phnom Penh Fiasco*" itu, ASEAN tidak menemui konsensus di antara negara anggotanya, secara khusus disebabkan oleh Kamboja yang mengambil posisi berbeda dari negara anggota lainnya. Dengan menggunakan pendekatan Konstruktivisme, penelitian kualitatif ini memahami latar belakang penolakan Kamboja terhadap pembentukan posisi bersama ASEAN terkait isu Laut China Selatan dalam *ASEAN Foreign Ministers Meeting* (AMM) ke-45 pada bulan Juli 2012.

Dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dua latar belakang penolakan Kamboja yang perlu dipahami menggunakan aspek historis dan aspek sosiologis. Pertama, penolakan Kamboja merupakan suatu bentuk usaha Kamboja untuk menjaga hubungan *patron-client* dengan China yang dipersepsikan sebagai pelindungnya. Persepsi Kamboja terhadap China sebagai negara pelindung dibangun dari interaksinya dengan Thailand dan Vietnam, serta interaksinya dengan China itu sendiri. Kedua, penolakan Kamboja juga dapat dipahami dengan melihat posisi Kamboja di ASEAN, di mana Kamboja mempelajari kegagalan ASEAN dalam menengahi sengketa Candi Preah Vihear sebagai sinyal bahwa ASEAN tidak dapat menjamin keamanan nasionalnya. Dalam konteks ini, persepsi Kamboja atas ASEAN dan China penting untuk menentukan posisi Kamboja di Laut China Selatan.

Kajian atas penolakan Kamboja ini memperkuat pandangan Amitav Acharya bahwa ASEAN merupakan komunitas keamanan pluralistik yang bersifat *nascent*. Hal ini terlihat dari masih adanya persepsi ancaman di antara negara anggota ASEAN, absennya tindakan kolektif atau kebijakan keamanan yang terkoordinasi dalam ASEAN sebagai indikasi rendahnya "*we-feeling*", serta ketidakmampuan ASEAN untuk menjadi institusi yang dapat menengahi sengketa di antara negara anggotanya.

Kata Kunci: Kamboja, ASEAN, China, Laut China Selatan, *Phnom Penh Fiasco*, interaksi sosial, *patron-client*

ABSTRACT

Name : Bobby Hizkia
Student Number : 2014330037
Judul : Cambodia's Rejection towards ASEAN Unified Stance in South China Sea Issue during 45th ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM), July 2012

In 2012, international community was surprised by no joint-communicque issued from the 45th AMM for the first time, within its 45 years of establishment. In that event known as the "Phnom Penh Fiasco", consensus was not reached among ASEAN members, particularly caused by Cambodia's decision to pursue a position that was different with the rest of the members. By using Constructivism, this qualitative research provides understanding about the background of Cambodia's rejection towards unified stance of ASEAN in regards to South China Sea issue during the 45th ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) held in July 2012.

From this research, it is concluded that there are two backgrounds behind Cambodia's rejection that need to be understood using historical and sociological aspect. First, the rejection came from Cambodia was a form of its effort to maintain patron-client relationship with China, the country that perceived by Phnom Penh as its protector. Cambodia's perception of China as its protector was (and is still being) built upon its interaction with Thailand and Vietnam, and its relations with China itself. Secondly, Cambodia's rejection can also be understood by seeing Cambodia's position in ASEAN, in which Cambodia learnt that the failure of ASEAN to handle the dispute of Preah Vihear Temple signals ASEAN's inability to guarantee the country's national security. Within this context, Cambodia's perceptions in regards to ASEAN and China are important to determine its position in the issue of South China Sea.

This study of Cambodia's rejection strengthens Amitav Acharya's view addressing ASEAN as a nascent pluralistic security community. This is shown by the existence of threat perception among ASEAN members, the absence of collective action or coordinated security policy within ASEAN—indicate the low level of "we-feeling" among them, and the inability of the organization to be an institution that could mediate dispute among its members.

Keywords: Cambodia, ASEAN, China, South China Sea, Phnom Penh Fiasco, social interaction, patron-client

KATA PENGANTAR

Bukan merupakan suatu perjalanan yang mudah bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terlepas dari sulitnya proses yang dihadapi, penulis pertama-tama ingin memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk setiap lindungannya yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata.

Apabila bukan karena penyertaannya, proses penulisan skripsi berjudul “Penolakan Kamboja terhadap Upaya Pembentukan Posisi Bersama ASEAN terkait Isu Laut China Selatan dalam *ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM)* ke-45, Juli 2012” ini tidak akan pernah menemui akhir. Juga, jika bukan karena kebaikan hati dan wawasan luas Mas Yulius Purwadi Hermawan, Drs., M.A., Ph.D. selaku pembimbing penulis, entah bagaimana nasib skripsi ini.

Penulisan skripsi ini didorong oleh kecintaan penulis terhadap kawasan Asia Tenggara. Dinamika regionalisme, dengan pro dan kontra dari berbagai pengamat mengenai signifikansi ASEAN, serta keberagaman negara yang ada di kawasan ini, semakin meyakinkan penulis untuk menulis skripsi mengenai hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi ASEAN saat ini mendapatkan tantangan dari kompleksitas sengketa Laut China Selatan. Perbedaan persepsi di antara negara anggota ASEAN mengancam kohesivitas dan sentralitas organisasi tersebut. Skripsi ini mengusung tema yang membahas bagaimana negara yang tidak terlibat sengketa sesungguhnya perlu diperhitungkan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi

kepada studi HI di Asia Tenggara mengenai sengketa Laut China Selatan, khususnya dari perspektif yang masih jarang dibahas.

Penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebagaimana penulis selalu ingat bahwa “tak ada gading yang tak retak”. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk kritik dan saran yang sekiranya dapat membantu penulis untuk melengkapi penelitian ini agar menjadi lebih baik.

Bandung, 13 Desember 2017

Bobby Hizkia

UCAPAN TERIMA KASIH

Sedikit ucapan terima kasih rasa-rasanya tidak akan menyakiti siapapun. Oleh karena itu, dalam ruang yang terbatas ini, izinkan saya untuk mengungkapkan rasa terima kasih terhadap mereka yang berperan dalam penulisan skripsi ini, serta dalam kehidupan saya:

Terima kasih kepada Mas Yulius Purwadi Hermawan, selaku pembimbing saya. Jika bukan karena bimbingan serta kesabaran Mas Pur, penulisan skripsi saya akan berjalan dengan tidak lancar. Terima kasih pula untuk seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional UNPAR atas ilmu dan wawasannya, serta seluruh staf dan karyawan atas berbagai kontribusi dalam bentuk apapun itu.

Terima kasih kepada kawan-kawan yang mewarnai masa-masa perkuliahan saya: Catharina Dheani, Giasinta Livia, Daniel Tantra, Yuliana Maria Mediatrice, Farhan Hardwin, Reizka Dwidianto, Vallencia Melvinsy, Marlyn Oktavia, Adriana Anjani, Muhammad Fakhri, Rizky Aji Pratama, Berlinda Nefertiti, Nabila Putri Kasyalia, Ivan Samuel Alvarta, Emmanuel Praditia Agung, Meylina Sarah, Sharon Patricia, Natanael Alvin, Loran Palseo, Ebenezer Setiawan, Maria Dolorosa Victoria, Inigo Goestiandi, Martine Hia, Suster Meriam Siagian, Fidelia Senjaya, dan kawan-kawan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terlalu panjang ucapan terima kasih yang harus saya ungkapkan mengenai kehadiran kalian dalam kehidupan saya. Satu yang penting: biarlah seluruh kebaikan kalian akan terus mengingatkan saya untuk selalu mendoakan kalian semua.

Terima kasih untuk Elory Leonard atas doa, dukungan, dan kata-kata yang memberkati. Terima kasih untuk selalu percaya pada saya. Terima kasih pula untuk Nabila Putri Salsabila. Kalian berdua adalah orang yang hebat.

Terima kasih untuk orang tua tercinta: Harjawan Harto dan Wiwik Djati. Kalian berdua adalah tulang punggung dan batu penjuru saya. Tidak ada kata yang dapat melukiskan bagaimana saya bersyukur memiliki kalian. Terima kasih untuk Feby Tania dan Yuby Abigail, kakak dan adik yang selalu menggandeng saya untuk kuat dalam menapaki hidup. Terima kasih pula untuk keluarga besar yang telah membantu baik dari segi material maupun moral. Saya mengasihi kalian semua di tengah-tengah ketidaksempurnaan yang ada, sebab sayapun tidak sempurna.

Dan di atas segalanya, terima kasih untuk Dia sang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Terima kasih untuk tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	ix
1. BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	6
1.2.2 Pembatasan Penelitian.....	10
1.2.3 Pertanyaan Penelitian.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4 Kajian Literatur.....	12
1.5 Kerangka Pemikiran.....	15
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.6.1 Metode Penelitian.....	20
1.6.2 Jenis Penelitian.....	21
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.7 Sistematika Pembahasan.....	22
2. BAB II. ASEAN DAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN.....	24
2.1 Latar Belakang dan Sejarah ASEAN.....	24
2.2 Visi Misi dan Struktur ASEAN.....	32
2.2.1 Visi Misi ASEAN.....	32
2.2.2 Struktur ASEAN.....	33

2.3 Pengambilan Keputusan dalam ASEAN.....	37
2.4 Sengketa Laut China Selatan.....	38
2.4.1 Gambaran Besar Sengketa.....	39
2.4.2 Pihak yang Berkonflik dan Dasar Klaim Mereka.....	42
2.4.3 Perspektif dan Posisi China terhadap Sengketa Laut China Selatan.....	46
2.4.4 Perspektif dan Posisi Individu Negara Anggota ASEAN.....	50
2.4.5 Perspektif dan Posisi ASEAN sebagai Sebuah Organisasi.....	53
2.5 Kesimpulan Bab.....	59
3. BAB III. LATAR BELAKANG PENOLAKAN KAMBOJA TERHADAP PEMBENTUKAN POSISI BERSAMA ASEAN TERKAIT ISU LAUT CHINA SELATAN DALAM AMM KE-45, JULI 2012.....	60
3.1 Penolakan Kamboja terhadap Pembentukan Posisi Bersama ASEAN dalam Konteks Hubungan Sino-Kamboja: Persepsi Kamboja terhadap China sebagai “Pelindung Kamboja”.....	61
3.1.1 China sebagai Pelindung Kamboja di antara Thailand dan Vietnam.....	73
3.1.2 China sebagai Pelindung Kamboja dalam Konteks Konsolidasi Rezim Hun Sen.....	78
3.1.3 China sebagai Pelindung Kamboja dalam Konteks Kontribusinya terhadap Ekonomi Kamboja.....	84
3.2 Penolakan Kamboja terhadap Pembentukan Posisi Bersama ASEAN dalam Konteks Hubungan Kamboja-ASEAN.....	90
4.2.1 Kegagalan ASEAN dalam Isu Candi Preah Vihear.....	95
3.3 Benang Merah dari Penolakan Kamboja: ASEAN sebagai Komunitas Keamanan Pluralistik.....	101
4. BAB IV. KESIMPULAN.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	110

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Model

Model 1.1 Proses Pembentukan Pemahaman Intersubjektif di Antara Aktor.....	17
Model 3.1 Proses Pembentukan Pemahaman Intersubjektif Kamboja dan China yang Melahirkan Persepsi China sebagai Pelindung Kamboja.....	69
Model 3.2 Proses Pembentukan Pemahaman Intersubjektif Kamboja dan ASEAN.....	94

Gambar

Gambar 2.1 Peta Sengketa Laut China Selatan.....	40
Gambar 3.1 Statistik Ekspor dan Impor Kamboja-China (2000 – 2012).....	85

Tabel

Tabel 2.1 Strategi Delaying China di Laut China Selatan.....	47
Tabel 2.2 Perspektif dan Posisi Individu Negara Anggota ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan (Sampai dengan Juli 2012).....	51
Tabel 3.1 Jumlah Dana Bantuan Asing yang Diterima oleh Kamboja dalam Juta Dolar AS (1992 – 2011)	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu organisasi regional, negara-negara anggota yang ada berupaya menyatukan pandangannya untuk menghasilkan suatu keputusan kolektif. Hal ini diungkapkan oleh Finn Laursen, bahwa pengambilan keputusan secara kolektif merupakan aspek penting dalam setiap upaya integrasi regional.¹ Leon Lindberg mengungkapkan lebih lanjut bahwa integrasi politik dalam konteks integrasi regional melibatkan proses di mana negara tidak lagi menjalankan kebijakan luar negeri maupun kebijakan dalam negeri utamanya secara independen satu sama lain, melainkan berupaya untuk membuat keputusan bersama (*joint-decision*) atau untuk mendelegasikan proses pengambilan keputusan kepada organ-organ baru yang bersifat sentral.² Dengan kata lain, kohesivitas atau kesatuan negara-negara anggota merupakan hal yang fundamental dalam suatu upaya integrasi kawasan.

Dewasa ini, proses integrasi kawasan terwujud dalam eksistensi organisasi regional sebagai suatu wadah bagi negara-negara di kawasan untuk menghasilkan kebijakan bersama dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan bersama. Interdependensi ekonomi ataupun kebutuhan akan manajemen konflik di kawasan, misalnya, merupakan beberapa faktor pendorong berkembangnya organisasi

¹ Finn Laursen, "Theory and Practice of Regional Integration," *Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series*, Vol. 8 No. 3, February 2008, dipublikasikan dengan dukungan European Commission, hlm. 4.

² Leon N. Lindberg, *The Political Dynamics of European Economic Integration* (Stanford: Stanford University Press, 1963), hlm. 6.

regional. Berkembangnya organisasi regional diharapkan dapat menjadi wadah kerja sama bagi negara-negara di kawasan dalam ranah politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang berdiri sejak tahun 1967. Secara normatif, tujuan dibentuknya ASEAN tertera dalam dokumen pendirian Deklarasi Bangkok untuk mempromosikan kerja sama antarnegara dan menciptakan stabilitas regional.³ ASEAN berdiri dalam konteks Asia Tenggara yang konflikual dan dihadapi oleh ketidakpastian. Melihat eksistensi mereka sebagai negara yang baru merdeka, adanya sengketa di antara beberapa negara, serta eskalasi Perang Vietnam di dataran Indochina, negara-negara di Asia Tenggara terdorong untuk membangun upaya kerja sama regional.⁴ Kerja sama regional yang tertuang dalam bentuk pendirian ASEAN dimaksudkan untuk menjembatani perbedaan dan menciptakan stabilitas di kawasan.

Salah satu pencapaian signifikan ASEAN pada periode awal pembentukannya tertuang dalam bentuk "*Treaty of Amity and Cooperation*" (TAC) yang dihasilkan pada KTT pertama ASEAN pada tahun 1976 di Bali, Indonesia.⁵ Dihasilkannya TAC merupakan salah satu fase terpenting dalam sejarah ASEAN, sebagaimana dokumen tersebut memuat norma-norma yang selanjutnya menjadi

³ ASEAN, "The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)," disahkan pada 8 Agustus 1967.

⁴ Lihat Roger Irvine, "The Formative Years of ASEAN: 1967-1975," dalam Alison Broinowski (ed.), *Understanding ASEAN* (London: Macmillan Press, 1982), hlm. 10; lihat pula Donald E. Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia* (Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 2009), hlm. 72.

⁵ Lihat ASEAN, "Treaty of Amity and Cooperation," disahkan pada 24 Februari 1976.

code of conduct dalam mengatur interaksi antarnegara di kawasan serta digunakan sebagai mekanisme institusional untuk menyelesaikan sengketa secara damai.⁶

Reputasi ASEAN meningkat di panggung internasional setelah organisasi tersebut menunjukkan solidaritas dan persistensi upaya diplomasinya dalam konflik Kamboja. Konflik Kamboja yang disebabkan oleh invasi Vietnam pada tahun 1978 menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara anggota ASEAN. Terdapat perpecahan di antara negara anggota mengenai langkah yang harus diambil dalam menghadapi Vietnam. Meski demikian, melalui persistensinya, ASEAN berhasil untuk mendorong dunia internasional untuk tidak mengakui rezim *People's Republic of Kampuchea* (PRK) yang didalangi oleh Vietnam.⁷ Konflik Kamboja menjadi suatu fase yang menumbuhkan rasa solidaritas di antara negara anggota ASEAN, sebagaimana di tengah segala perbedaan yang ada, ASEAN berhasil bertahan untuk bekerja bersama dan untuk sepakat mengecam invasi Vietnam.

Dalam perjalanannya, ASEAN mengalami perluasan keanggotaan. Pada tahun 1984, setelah Inggris memberikan kemerdekaan, Brunei Darussalam menjadi anggota keenam ASEAN. Keanggotaan Vietnam yang sebelumnya nampak terbuka setelah berakhirnya Perang Vietnam menemui hambatan setelah pada tahun 1978, Vietnam melakukan invasi atas Kamboja. Kendati demikian, Vietnam akhirnya mendapatkan keanggotaan ASEAN pada tahun 1995. Selanjutnya, Laos dan Myanmar menyusul menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997.

⁶ Yuen Foong Khong, "ASEAN and the Southeast Asian Security Complex," dalam David A. Lake dan Patrick M. Morgan (ed.), *Regional Orders: Building Security in a New World* (University Park: The Pennsylvania State University Press, 1997), hlm. 332.

⁷ Untuk memahami lebih lanjut mengenai keberhasilan ASEAN dalam konflik Kamboja, lihat Amitav Acharya, *The Quest for Identity: International Relations of Southeast Asia* (Singapore: Oxford University Press, 2000).

Keanggotaan Kamboja yang seharusnya didapatkan bersama dengan Laos dan Myanmar ditunda oleh ASEAN karena terdapat instabilitas politik internal di dalam pemerintahan Kamboja. Pada tahun 1999, Kamboja akhirnya diterima menjadi anggota kesepuluh ASEAN, menandakan terbentuknya formasi ASEAN-10. Meskipun hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN untuk mempertahankan kohesivitasnya, ASEAN-10 sesungguhnya menjadi modal yang strategis untuk menciptakan kawasan yang kooperatif dan bersatu di masa depan.⁸

Pada periode pasca-Perang Dingin, ASEAN mengalami perkembangan yang menyentuh tahap kooperasi yang lebih besar, mencakup kerja sama dalam ranah ekonomi dan sosial budaya. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Singapura pada tahun 1992 membawa perubahan signifikan pada struktur birokratik ASEAN.⁹ Pada tahun yang sama, para pemimpin ASEAN juga sepakat untuk memperluas wilayah kerja sama dalam bidang ekonomi. Tahun 1992 menandakan fase baru dalam kerja sama bidang ekonomi di antara negara-negara ASEAN. KTT di Singapura menghasilkan perjanjian mengenai ASEAN Free Trade Area (AFTA), di mana kerja sama tersebut diupayakan untuk mempromosikan “perdagangan bebas” di kawasan.¹⁰ Negara anggota ASEAN setuju untuk mengurangi hambatan perdagangan dengan mengurangi tingkat *common effective preferential tariff* (CEPT). Selanjutnya, ASEAN mengusung inisiatif kerja sama ekonomi yang lebih

⁸ Jusuf Wanandi, “ASEAN’s Past and the Challenges Ahead: Aspects of Politics and Security,” dalam Simon S. C. Tay, Jesus P. Estanislao, dan Hadi Soesastro (ed.), *Reinventing ASEAN* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001), hlm. 29.

⁹ Donald E. Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia* (Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 2009), hlm. 103 – 105.

¹⁰ Hal Hill dan Jayant Menon, “ASEAN Economic Integration: Features, Fulfillments, Failures and the Future,” Working Paper Series on Regional Economic Integration No. 69, 2009, hlm. 5.

ambisius lagi, yaitu yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dalam rangka mengintegrasikan perekonomian negara-negara di kawasan ke dalam satu pasar tunggal.

Para pemimpin ASEAN juga sepakat bahwa diperlukan kerja sama lebih besar lagi untuk semakin menumbuhkan identitas bersama di kawasan. Hal ini kemudian tertuang dalam penandatanganan "*Bali Concord II*" pada tahun 2003 yang melahirkan visi "Masyarakat ASEAN".¹¹ Visi besar ASEAN yang cukup ambisius tersebut diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2020.¹² Terdapat tiga pilar utama dalam Masyarakat ASEAN, meliputi: 1) Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN¹³ yang bertujuan untuk menciptakan kerja sama dalam bidang politik dan keamanan di antara anggota; 2) Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berfokus pada pembentukan pasar tunggal di kawasan; dan 3) Masyarakat Sosial Budaya ASEAN yang menekankan kooperasi seputar permasalahan-permasalahan sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat.¹⁴ Visi ini kemudian dipertegas kembali dalam sub-tujuan yang lebih spesifik dalam "*Bali Concord III*" yang ditandatangani pada tahun 2011.

Kerja sama dalam ASEAN juga kini menyentuh berbagai isu keamanan yang bersifat non-tradisional, mencakup di antaranya isu lingkungan, *drug-trafficking*, migrasi, AIDS, pembajakan, dan berbagai bentuk kejahatan

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Pada awalnya disebut dengan "Masyarakat Keamanan ASEAN," sebagaimana yang tertera pada Bali Concord II.

¹⁴ ASEAN, "Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)," disahkan di Bali, Indonesia pada 7 Oktober 2003.

transnasional.¹⁵ Kesatuan negara anggota ASEAN dalam menghadapi isu-isu tersebut terlihat dari berbagai keputusan yang dihasilkan secara bersama, salah satunya yang terkait dengan isu terorisme. Pada tahun 2001, misalnya, ASEAN mengeluarkan “*ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*” yang menunjukkan komitmen seluruh negara anggota ASEAN untuk memerangi aksi terorisme.¹⁶ Kemudian pada *ASEAN Summit* (KTT ASEAN) tahun 2002, dikeluarkan pula deklarasi bersama yang mengimbau peningkatan kerja sama dalam bidang *counterterrorism* pasca serangan terorisme di Indonesia dan Filipina.¹⁷

Dari berbagai fakta di atas, dapat dikatakan bahwa sejak tahun 1967, ASEAN telah melalui berbagai perkembangan dengan beberapa pencapaian signifikan bagi kawasan Asia Tenggara. Perkembangan tersebut di antaranya meliputi perluasan keanggotaan ASEAN yang diikuti dengan perluasan bidang kerja sama di bawah satu visi bersama menuju “satu Asia Tenggara”.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Meski telah berdiri sejak tahun 1967 sebagai sebuah upaya integrasi regional dengan berbagai pencapaian yang signifikan, kritik terhadap ASEAN salah satunya ditujukan pada absennya suatu tindakan kolektif dalam isu sengketa Laut China Selatan. Tidak adanya tindakan kolektif ini secara khusus dapat terlihat dari

¹⁵ Wanandi, “ASEAN’s Past and the Challenges Ahead: Aspects of Politics and Security,” dalam Tay, Estanislao, dan Soesastro (ed.), *Reinventing ASEAN*, hlm. 29.

¹⁶ Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia*, hlm. 172.

¹⁷ Ibid.

bagaimana masih terdapat ketidaksamaan pendapat antarnegara anggota ASEAN dalam sengketa Laut China Selatan. Tidak dihasilkannya komunike bersama (*joint communiqué*) pada *ASEAN Foreign Ministers Meeting* (AMM) bulan Juli tahun 2012 di Phnom Penh, Kamboja, yang dikenal juga dengan sebutan “*Phnom Penh Fiasco*”¹⁸, telah menciderai kredibilitas organisasi ini. Peristiwa tersebut jelas membuat ASEAN dipandang sebagai kesatuan regional yang tidak kohesif, khususnya dalam menghadapi isu Laut China Selatan. Sentralitas ASEAN di kawasan juga dipertanyakan.

Sebelum diselenggarakannya KTT ASEAN, para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN bertemu untuk memformulasikan kebijakan dalam bidang politik serta berbagai isu pokok sehubungan dengan ASEAN. AMM bertanggung jawab memberikan laporan kepada KTT, sehingga penting bagi AMM untuk mencapai konsensus yang tertuang dalam bentuk komunike bersama. Sayangnya, pada AMM ke-45, untuk pertama kali dalam sejarah berdirinya organisasi tersebut, tidak ada komunike bersama yang dihasilkan.

Pada saat itu, Kamboja menjadi tuan rumah AMM ASEAN ke-45 sekaligus menjabat sebagai Ketua ASEAN untuk periode tersebut. Kepemimpinan Kamboja dikelilingi oleh banyak ekspektasi terkait perkembangan respon ASEAN terhadap isu Laut China Selatan, khususnya dari Vietnam dan Filipina. Meski demikian, Kamboja menunjukkan sikap yang enggan untuk membahas isu Laut China Selatan, sebagaimana Menteri Luar Negeri Hor Namhong mengungkapkan bahwa

¹⁸ Cheunboran Chanborey, “The South China Sea and ASEAN Unity: A Cambodian Perspective,” *Cambodian Institute for Strategic Studies (CISS)*, Issue 06, September 2016, hlm. 2.

Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN “bukan pengadilan dan bukan tempat untuk menjatuhkan keputusan terkait sengketa”.¹⁹ Hor Namhong juga mengungkapkan bahwa Kamboja melihat isu Laut China Selatan sebagai isu bilateral (antara China dan Filipina), dan oleh karenanya tidak dapat dimasukkan ke dalam komunikasi bersama.²⁰ Secara spesifik, kesepakatan tidak dapat dicapai oleh karena keengganan Kamboja untuk memasukkan kata-kata yang menyinggung insiden Beting Scarborough, keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA), maupun terkait dengan militerisasi di Laut China Selatan.²¹ Oleh karenanya, meski bukan termasuk negara yang terlibat dalam sengketa, posisi Kamboja dalam isu Laut China Selatan mulai mendapatkan perhatian para pengamat sejak peristiwa “*Phnom Penh Fiasco*”, yakni sebagai pihak yang berkontribusi pada kegagalan tercapainya konsensus.²²

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa China sebagai salah satu negara berkekuatan besar, dengan ambisinya untuk menjadi pemain global, merupakan

¹⁹ “Indonesia kecewa hasil pertemuan tingkat menteri ASEAN,” *BBC Indonesia*, 16 Juli 2012, diakses pada 28 Maret 2017, melalui situs http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/07/120716_indonesiaasean.shtml.

²⁰ Prak Chan Tul dan Stuart Grudgings, “SE Asia meeting in disarray over sea dispute with China,” *Reuters*, 13 Juli 2012, diakses pada 7 November 2017, diakses melalui <http://www.reuters.com/article/us-asean-summit/se-asia-meeting-in-disarray-over-sea-dispute-with-china-idUSBRE86C0BD20120713>.

²¹ Dr. Rahul Mishra, “Cambodia: China’s Special Partner?” *Indian Council of World Affairs*, 15 Maret 2016, diunduh melalui www.icwa.in/pdfs/VP/2014/CambodiaChinaSpecialPartnerVP14032016.pdf.

²² Misalnya lihat Chanborey, “The South China Sea and ASEAN Unity: A Cambodian Perspective,” hlm. 2.; Terence Chong, “The Politics behind Cambodia’s Embrace of China,” *ISEAS Yusof Ishak Institute*, 2 Agustus 2017, Issue: 2017, No. 59; Sabam Siagian, “Is Phnom Penh fiasco the beginning of end of ASEAN?” *GMA News Online*, 17 Juli 2012, diakses pada 27 Maret 2017, diakses melalui situs <http://www.gmanetwork.com/news/opinion/content/265660/is-phnom-penh-fiasco-the-beginning-of-end-of-asean/story/>; Le Hong Hiep, “Can ASEAN Overcome the ‘Consensus Dilemma’ over the South China Sea?” *ISEAS Yusof Ishak Institute*, 26 Oktober 2016, Issue: 2016, No. 58; Luke Hunt, “ASEAN Summit Fallout Continue,” *The Diplomat*, 20 Juli 2012, diakses pada 28 Maret 2017, diakses melalui situs <https://thediplomat.com/2012/07/asean-summit-fallout-continues-on/>.

pihak yang perlu dihadapi ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan, khususnya dalam konteks Laut China Selatan. Dalam peristiwa *Phnom Penh Fiasco*, negara-negara anggota ASEAN lainnya maupun dunia internasional menyoroti kedekatan hubungan China dan Kamboja yang diduga mendorong Kamboja untuk membela kepentingan nasional China di Laut China Selatan. Kamboja memiliki pandangan yang sama dengan China, yaitu menolak internasionalisasi isu Laut China Selatan.²³ Menariknya lagi, beberapa laporan mengungkapkan bahwa beberapa pejabat Kamboja berbagi draf komunikasi bersama dengan pihak China.²⁴ Laos dan Myanmar juga disebut-sebut sebagai negara ASEAN yang pro-China. Di satu sisi, semakin agresifnya Beijing di kawasan Laut China Selatan juga membuka pintu bagi rivalitas antara China dengan Amerika Serikat. Filipina dan Thailand merupakan “aliansi” tradisional Amerika Serikat, di saat Vietnam yang mempersepsikan China sebagai musuh utamanya, terbuka atas kehadiran AS di kawasan.

Apabila dilihat dalam konteks kehadiran aktor eksternal, “hubungan spesial” beberapa negara anggota ASEAN baik dengan China maupun AS sesungguhnya mengancam kohesivitas ASEAN sebagai organisasi regional. Keceraian-beraian organisasi dikarenakan negara-negara anggotanya lebih memilih untuk berafiliasi dengan negara-negara besar merupakan mimpi terburuk ASEAN.

²³ Tul, “Hu wants Cambodia help on China Sea dispute, pledges aid.”

²⁴ Ernest Z. Bower, “China Reveals Its Hand on ASEAN in Phnom Penh,” *Centre for Strategic and International Studies*, 20 Juli 2012, diakses pada 7 November 2017, diakses melalui <https://www.csis.org/analysis/china-reveals-its-hand-asean-phnom-penh>.

Beberapa pengamat memang berpendapat bahwa sengketa Laut China Selatan merupakan ujian bagi ASEAN atas kesatuan organisasi ini.²⁵

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penelitian ini berfokus pada Kamboja sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang dituduh menjadi “kambing hitam” dibalik kegagalan ASEAN untuk membentuk posisi bersama terkait isu Laut China Selatan. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai latar belakang penolakan yang dilakukan Kamboja terhadap upaya pembentukan posisi bersama ASEAN terkait isu Laut China Selatan pada AMM ke-45 di Phnom Penh pada Juli 2012.

1.2.2 Pembatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan pembatasan atas hal yang hendak diteliti. Fokus utama akan diarahkan pada Kamboja yang melakukan penolakan terhadap pembentukan posisi bersama ASEAN terkait sengketa Laut China Selatan. Meski demikian, penulis juga mengkaji posisi setiap negara anggota ASEAN dalam memahami konteks kohesivitas organisasi tersebut dalam menghadapi sengketa Laut China Selatan. Sengketa Laut China Selatan yang dimaksud meliputi sengketa

²⁵ Misalnya lihat: Ramses Amer, “The South China Sea: Challenge for Asean,” *Institute for Security and Development Policy*, Policy Brief No. 150 March 31, 2014; Commodore Agus Rustandi, “The South China Sea Dispute: Opportunities for ASEAN to enhance its policies in order to achieve resolution,” *The Centre for Defence and Strategic Studies (CDSS)*, April 2016; Chanborey, “The South China Sea and ASEAN Unity: A Cambodian Perspective,”; Vincent Wei-cheng Wang dan Chyungly Lee, “ASEAN and Recent Tensions in the South China Sea,” dalam Szu-shen Ho, Kuan-hsiung Wang, dan Yingjiu Ma A (ed.), *Bridge Over Troubled Waters: Prospects for Peace in the South and East China Seas* (Taipei: Prospect Foundation, 2014); Sheldon W. Simon, “Conflict and Diplomacy in the South China Sea: The View from Washington,” *Asian Survey*, Vol. 52, Number 6 (2012); Munir Majid, “Southeast Asian view of China’s ‘not so neighbourly’ rise,” artikel ini mengacu pada presentasi yang dibuat pada LSE China Conference di Beijing, 15 Agustus 2013, *International Politics*, Vol. 51, Issue 3 (2014).

atas Kepulauan Paracel, Beting Scarborough, dan Kepulauan Spratly. Konteks isu Laut China Selatan yang dibahas dalam penelitian ini hanya berfokus pada lingkup dinamika ASEAN dengan China. Lebih lanjut, penolakan Kamboja terhadap upaya pembentukan posisi bersama ASEAN secara spesifik merujuk kepada peristiwa “*Phnom Penh Fiasco*”, yaitu peristiwa gagal dihasilkannya komunikasi bersama pada AMM ke-45 tanggal 9 hingga 13 Juli tahun 2012 di Phnom Penh, Kamboja. Untuk melihat alasan penolakan Kamboja, penulis banyak mempergunakan data-data historis.

1.2.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Mengapa Kamboja menolak pembentukan posisi bersama ASEAN terkait isu Laut China Selatan dalam pertemuan AMM ke-45 pada bulan Juli 2012?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami latar belakang penolakan Kamboja terhadap pembentukan posisi bersama ASEAN terkait isu Laut China Selatan dalam pertemuan AMM ke-45 pada bulan Juli 2012.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan informasi kepada para pembaca mengenai posisi Kamboja dan signifikansinya terhadap penyelesaian sengketa Laut China Selatan dalam ASEAN, khususnya dalam konteks kohesivitas negara anggota ASEAN ketika dihadapkan pada isu terkait.

1.4 Kajian Literatur

Masih belum terdapat banyak penelitian yang membahas secara spesifik mengenai Kamboja dan posisinya dalam ASEAN terkait isu sengketa Laut China Selatan. Hal ini mengingat fakta bahwa Kamboja bukanlah negara yang terlibat dalam sengketa. Meski demikian, penulis menemukan beberapa literatur yang sekiranya masih terkait dengan topik bahasan penulis dan dapat memberikan suatu konteks atas topik yang hendak dibahas, yakni mencakup tulisan mengenai masa depan ASEAN sebagai organisasi regional di tengah-tengah berbagai ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kehadiran dua raksasa; perbedaan pendapat di dalam ASEAN terkait sengketa Laut China Selatan, khususnya melihat posisi Vietnam; serta hubungan Sino-Kamboja dan implikasinya terhadap isu Laut China Selatan.

Alexandra Retno Wulan, dalam tulisan berjudul “Komunitas ASEAN 2015 Pasca Pertemuan Phnom Penh”, mengungkapkan adanya kesenjangan antara kondisi normatif, di mana ASEAN seharusnya menjadi satu komunitas dengan kondisi riil namun gagal dalam mengeluarkan pernyataan bersama terkait kasus

Laut China Selatan.²⁶ Perbedaan sikap di antara negara anggota ASEAN ini dipandang oleh Wulan sebagai bentuk ancaman terhadap stabilitas kawasan regional.²⁷ Perbedaan sikap di antara negara anggota ASEAN ini kemudian dilihat melalui kaca mata kehadiran kekuatan eksternal, di mana pada saat ini, ASEAN berdiri di antara dua raksasa, yakni China dan Amerika Serikat. Hal tersebut berimplikasi pada kecerai-beraian organisasi ini mengingat terdapat perbedaan persepsi ancaman di antara negara-negara anggota.²⁸ Kesimpulan utama yang kemudian diusung oleh Wulan adalah bahwa proses institusionalisasi menjadi penting untuk memastikan terwujudnya satu komunitas ASEAN karena hanya dengan cara tersebutlah maka organisasi regional ini dapat menjadi signifikan di tengah dinamika rivalitas kekuatan eksternal.²⁹

Tulisan “*Vietnam, ASEAN, and the South China Sea: Unity or Diverseness?*” oleh Tomotoka Shoji membahas secara spesifik mengenai perbedaan pandangan antarnegara anggota ASEAN, secara khusus dengan melihat posisi Vietnam dalam isu Laut China Selatan. Meski tulisan tersebut tidak membahas secara spesifik mengenai Kamboja, penulis melihat bahwa konteks yang diungkapkan oleh Shoji dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan posisi negara-negara anggota ASEAN dalam isu terkait. Shoji mengungkapkan bahwa rumitnya penyatuan pandangan dalam ASEAN terkait sengketa Laut China Selatan, selain karena perbedaan pendapat negara-negara yang bersengketa, didorong pula

²⁶ Alexandra Retno Wulan, “Komunitas ASEAN 2015 Pasca Pertemuan Phnom Penh,” *Analisis CSIS*, Vol. 41 No. 3 (2012).

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

oleh posisi negara-negara yang tidak bersengketa, meliputi Laos, Myanmar, dan Kamboja, yang disebut-sebut sebagai negara yang “pro-China”.³⁰

Tulisan lain menyoroti tentang hubungan Sino-Kamboja yang tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai penolakan Kamboja terhadap posisi bersama ASEAN terkait isu Laut China Selatan. Dalam tulisan berjudul “*Cambodia-China Relations: A Positive-Sum Game?*” yang diterbitkan dalam *Journal of Current Southeast Asian Affairs* tahun 2012, Heng Pheakdey membahas mengenai hubungan Sino-Kamboja yang semakin erat baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.³¹ Hadirnya China sebagai kawan Kamboja setidaknya dapat dikaji melalui empat hal utama, meliputi investasi, perdagangan, bantuan luar negeri, dan bantuan militer, yang berimplikasi terhadap masa depan yang dimainkan oleh Beijing terhadap masa depan Phnom Penh.³² Pheakdey mengungkapkan bahwa para pengamat melihat keanggotaan Kamboja di ASEAN sebagai salah satu hal yang penting bagi China untuk mewujudkan kepentingannya di kawasan Asia Tenggara, salah satunya terkait isu Laut China Selatan.³³

Ketiga literatur di atas tidak membahas secara spesifik mengenai posisi ataupun respon Kamboja dalam ASEAN terkait dengan isu Laut China Selatan, melainkan melihat secara luas posisi ASEAN sebagai organisasi regional dan hubungannya terhadap kasus terkait, serta satu di antaranya membahas mengenai hubungan Sino-Kamboja secara luas. Berbeda dari kebanyakan penelitian yang

³⁰ Ibid.

³¹ Heng Pheakdey, “Cambodia–China Relations: A Positive-Sum Game?” *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 31 No. 2 (2012).

³² Ibid, hlm. 59 – 67.

³³ Ibid.

telah ada, penulis mengambil topik penelitian yang bukan sekadar membahas ASEAN secara luas, atau hubungan Sino-Kamboja secara eksklusif, melainkan berfokus pada satu negara anggota yang memiliki pengaruh terhadap kohesivitas ASEAN. Dalam penelitian ini, penulis mengambil Kamboja sebagai variabel yang mempengaruhi kohesivitas ASEAN dalam menghadapi sengketa Laut China Selatan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang diambil oleh penulis akan tersusun dari pendekatan, teori, dan konsep-konsep yang berasal dari khazanah Ilmu Hubungan Internasional. Kerangka pemikiran berfungsi sebagai teori dasar yang dipegang oleh penulis dalam melihat dunia, atau secara praktis dalam menginterpretasikan data yang telah didapat.³⁴ Dengan kata lain, kerangka pemikiran dibutuhkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif atas suatu fenomena sosial yang hendak diteliti.³⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Konstruktivisme yang dicetuskan oleh Alexander Wendt. Secara umum, para pemikir Konstruktivisme memiliki asumsi bahwa struktur normatif, yang di dalamnya terdapat serangkaian sistem ide, kepercayaan, dan nilai, tidak kalah penting dari struktur material yang sangat dipercayai oleh pemikir Neo-Neo.³⁶ Struktur normatif

³⁴ Gretchen B. Rossman dan Sharon F. Rallis, *Learning in the Field: An Introduction to Qualitative Research* - 3rd Edition (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2012), hlm. 121.

³⁵ Yosef Jabareen, "Building a Conceptual Framework: Philosophy, Definitions, and Procedure," *International Journal of Qualitative Methods* 2009, Vol. 8 No. 4 (2009), hlm. 51.

³⁶ Christian Reus-Smit, "Constructivism," dalam Burchill et al, *Theories of International Relations 2nd ed.* (Houndmills: Palgrave, 2001), hlm. 216.

ini memberikan pengaruh yang besar dalam menentukan tindakan sosial dan politik tertentu. Bila mengutip kata-kata Alexander Wendt, struktur material menjadi bermakna bagi tindakan manusia hanya jika terdapat struktur normatif yang tersimpan di dalamnya.³⁷ Kedua, Konstruktivisme percaya bahwa memahami bagaimana aktor-aktor dalam politik internasional membentuk kepentingan mereka merupakan hal yang penting untuk menjelaskan berbagai fenomena yang ada, yang ironisnya, seringkali diabaikan oleh para pemikir Neo-Neo dan pemikir Rasionalisme lainnya.³⁸ Proses pembentukan kepentingan ini ditentukan oleh faktor identitas sebagai suatu bentuk struktur non-material. Dalam hal ini, dengan kembali mengutip kata-kata Wendt, “identitas merupakan basis dari kepentingan”.³⁹ Dalam konteks Konstruktivisme, identitas merupakan variabel yang bergantung pada konteks historis, budaya, politik, dan sosial.⁴⁰ Identitas bukan hanya datang dari dalam negara itu sendiri, melainkan pula dibentuk dari berbagai interaksi yang terjadi di antara negara-negara dalam politik internasional.⁴¹

Dalam tulisannya, Wendt mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan konsepsi mengenai dirinya (identitasnya) dan kepentingannya, suatu aktor akan berkaca pada aktor lain melalui interaksi yang terjadi di antara mereka.⁴² Interaksi menghasilkan pemahaman intersubyektif di antara aktor, yang kemudian mendefinisikan identitas dan kepentingan para aktor, dan pada akhirnya

³⁷ Ibid, hlm. 217.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Melly Caballero-Anthony, *Regional Security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way* (Singapore: ISEAS, 2005), hlm. 35.

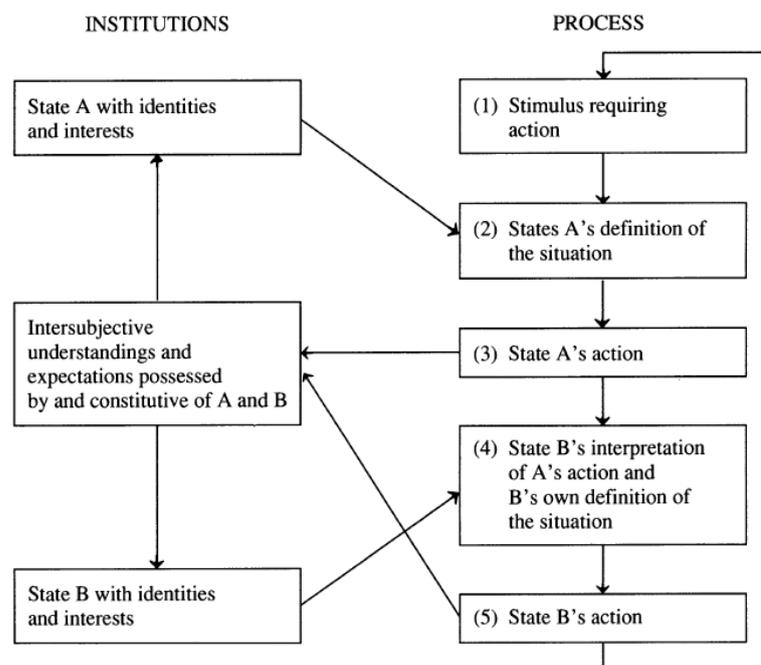
⁴¹ Ibid.

⁴² Alexander Wendt, “Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics,” *International Organization*, Vol. 46 No. 2. (Spring, 1992), hlm. 405.

menghasilkan suatu struktur yang baru di dalam hubungan antara aktor terkait. Dengan kata lain, Wendt mencoba mengatakan bahwa tidak ada struktur, termasuk di dalamnya anarki, ataupun agen, yang tercipta secara natural, melainkan semuanya dibentuk melalui konstruksi sosial.

Berikut ini adalah model yang menggambarkan operasionalisasi pembentukan pemahaman intersubjektif di antara aktor melalui interaksi yang dilakukan secara konstan:

Model 1.1
Proses Pembentukan Pemahaman Intersubjektif di Antara Aktor



Sumber: Alexander Wendt, "Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics," *International Organization*, Vol. 46 No. 2. (Spring, 1992), hlm. 406.

Apabila proses di atas berlangsung secara berulang-ulang, melibatkan interpretasi masing-masing aktor, maka akan terbentuk persepsi yang relatif tetap

(stabil) mengenai diri sendiri maupun aktor lain.⁴³ Persepsi merupakan suatu konsep yang sentral di dalam Konstruktivisme, sebagaimana hal ini akan berpengaruh terhadap pembentukan identitas dan kepentingan para aktor. Apabila mengacu kembali kepada apa yang diungkapkan oleh Wendt, maka dapat dikatakan bahwa persepsi yang terbentuk dari interaksi antaraktor, yang kemudian membentuk identitas dan kepentingan, akan menentukan struktur macam apa yang akan tercipta. Persepsi para aktor tidak begitu saja tercipta, melainkan bersifat dinamis, spesifik terhadap konteks tertentu, dan terkait erat dengan hubungan dengan aktor lain.⁴⁴

Dalam melihat kehadiran organisasi internasional dalam politik internasional, Konstruktivisme memiliki pandangan bahwa organisasi internasional dapat mempromosikan norma-norma baru yang akan mempengaruhi tindakan serta kepentingan negara anggota.⁴⁵ Dengan kata lain, mengutip pemikiran Finnemore dan Sikkink, organisasi internasional dapat menjadi agen konstruksi sosial yang berusaha mengubah cara pandang negara.⁴⁶ Dalam hal ini, organisasi internasional dapat menjadi aktor yang mendorong terciptanya tujuan-tujuan baik untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, misalnya mencakup permasalahan kemiskinan, kolonialisme, perbudakan, dan lain sebagainya. Alice D. Ba mengungkapkan bahwa institusi merupakan arena sosial dan arena sosialiasi, di

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Wendt, "Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics," hlm. 397. Spesifik terhadap konteks tertentu berarti bahwa pembentukan identitas dan kepentingan bersifat berbeda dari satu aktor ke aktor lain, tergantung dari konteks historis, budaya, politik, dan sosial yang melingkupi aktor terkait.

⁴⁵ Margaret P. Karns and Karen A. Mingst, *International Organization: The Politics of Processes of Global Governance* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2004), hlm. 51.

⁴⁶ Ibid.

mana ide-ide, definisi mengenai diri sendiri maupun pihak lain, ataupun dinamika politik yang baru, dapat berkembang, bertahan, atau direproduksi.⁴⁷

Penulis akan menggunakan konsep hubungan *patron-client* yang sering dijumpai dalam sistem politik pada beberapa budaya.⁴⁸ Dalam mendefinisikan hubungan *patron-client*, penulis akan mengacu pada tulisan James C. Scott yang memaparkan tiga karakteristik khusus dalam jenis hubungan sosial tersebut, yaitu:

1. Terdapat perbedaan kekuasaan yang dimiliki oleh dua aktor, di mana aktor yang lebih kuat dan memiliki status sosial lebih tinggi akan disebut sebagai *patron* dan yang lebih rendah akan disebut *client*. Aktor yang menjadi *patron* akan memberikan bantuan dalam berbagai bentuk secara unilateral, meliputi bantuan ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya, yang akan menjamin keberlangsungan hidup *client*. Di satu sisi, kemampuan *patron* untuk membantu *client* akan memudahkannya untuk memberikan suatu kewajiban bagi sang *client*. Jadi, dalam hal ini terdapat resiprositas;
2. Hubungan yang terjadi bersifat *face-to-face* dan personal. Resiprositas yang terjadi di antara *patron-client* akan menumbuhkan dan memperkuat ikatan *patron-client* yang akan menumbuhkan kepercayaan dan “kasih sayang”. Dalam kata-kata Scott, meskipun hubungan *patron-client* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, hubungan tersebut tidak semata-mata merupakan

⁴⁷ Alice D. Ba, *(Re)Negotiating East and Southeast Asia* (Stanford: Stanford University Press, 2009), hlm. 21.

⁴⁸ Hubungan *patron-client*, bersama dengan aspek lainnya, misalnya ikatan kekeluargaan, dapat dipahami sebagai suatu budaya dalam beberapa sistem politik. Hal ini misalnya ditemukan dalam tulisan Clifford Geertz sebagai bagian dari politik Bali pada abad ke-19. Oliver Wolters mengungkapkan bahwa relasi politik tradisional di Asia Tenggara melibatkan loyalitas kepada para pemimpin yang seringkali diasosiasikan dengan kapabilitas tertentu yang sifatnya “transendental”. Lihat Amitav Acharya dan Barry Buzan, *Non-Western International Relations Theory: Perspectives On and Beyond Asia* (Oxon: Routledge, 2010), hlm. 141.

ikatan saling menguntungkan, melainkan sebuah ikatan kepercayaan dan bentuk loyalitas yang sejati;

3. Hubungan antara *patron-client* bersifat fleksibel, dalam arti mencakup seluruh aspek hidup dari aktor yang terlibat. Hal ini membedakan dengan hubungan kontrak yang hanya mencakup aspek kerja sama tertentu.⁴⁹

Pendekatan Konstruktivisme menjadi dasar cara pandang penulis dalam penelitian ini. Pada Bab II, cara pandang Konstruktivisme terhadap organisasi internasional berguna dalam memahami ASEAN. Lebih lanjut, proses pembentukan identitas dan pemahaman intersubjektif di antara aktor digunakan oleh penulis untuk memahami latar belakang penolakan Kamboja dalam AMM ke-45, tepatnya pada Bab III. Penulis menggunakan konsep hubungan *patron-client* sebagai suatu bentuk budaya politik yang dipegang oleh aktor-aktor tertentu. Mengingat Konstruktivisme menekankan pentingnya memahami konteks historis, budaya, politik, dan sosial, historisisme dan sosiologis menjadi pendekatan yang dominan dalam penelitian ini.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penulis mendasarkan penelitian ini pada metodologi yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif, yaitu penelitian yang tidak

⁴⁹ Dirangkum dari James C. Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia," *The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1 (Maret 1972).

melepaskan pemahaman sang peneliti dalam menginterpretasikan data yang didapat.⁵⁰ Para peneliti kualitatif melihat dunia sosial sebagaimana adanya, menerimanya sebagai sistem yang holistik, interaktif, kompleks, dan tidak berupaya untuk menjadikannya sebagai satu variabel yang dapat disederhanakan.⁵¹ Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berupaya untuk mengontrol lalu memprediksi, melainkan berfokus untuk menghasilkan deskripsi, analisis, dan interpretasi.⁵²

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha untuk memahami sesuatu melalui mendeskripsikan hal yang ingin dipahami, sehingga akan didapatkan gambaran atas proses sosial yang kompleks dan menghantarkan pada pemahaman melalui deskripsi analitis yang detail.⁵³ Terkait dengan hal ini, penulis berupaya untuk memahami (*understanding*) fenomena yang dikaji oleh penulis. Penelitian memahami, berbeda dengan penelitian menjelaskan (*explaining*) yang berusaha mengkaji ilmu sosial sama seperti ilmu alam. Penelitian ini menggunakan metode hermeneutika, yakni melibatkan penafsiran dari penulis.⁵⁴ Penulis berupaya mengerti cara pandang aktor yang diteliti, meliputi bagaimana aktor memandang

⁵⁰ Rossman dan Rallis, *Learning in the Field: An Introduction to Qualitative Research*, , hlm. 6.

⁵¹ Ibid, hlm. 9.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid, hlm. 16.

⁵⁴ Martin Hollis and Steve Smith, *Understanding and Explaining International Relations* (New York: Oxford University Press, 1990), hlm. 71.

isu, apa yang mereka percayai, apa yang ingin dicapai, dan lain sebagainya.⁵⁵ Oleh karena itu, penelitian ini menganggap penting penggunaan data-data historis untuk memahami aktor yang menjadi fokus penelitian penulis secara lebih mendalam.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis bergantung pada studi pustaka, meliputi pengumpulan beberapa data sekunder yang didapat dari buku, jurnal, laman *web*, laporan, dan lain sebagainya. Dalam studi pustaka, data-data yang diperoleh digunakan untuk menjelaskan makna dari penelitian ini.⁵⁶ Penulis akan menganalisis dan menarik kesimpulan data-data tersebut. Data-data historis akan banyak digunakan oleh penulis. Penulis juga akan menggunakan sumber-sumber tertulis yang dipublikasikan oleh pusat studi yang terdapat di Kamboja serta yang dikeluarkan oleh pemerintah Kamboja.

1.7 Sistematika Pembahasan

Berikut ini merupakan sistematika pembahasan dari skripsi yang hendak ditulis oleh penulis:

Bab I: Bagian pendahuluan, mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁵⁵ Ibid, hlm. 2.

⁵⁶ Robert K. Yin, *Case Study Research; Design and Methods* – 4th Edition (California: Sage Publication, Inc, 2009), hlm. 101 – 105.

Bab II: Dengan menggunakan cara pandang Konstruktivisme terhadap organisasi internasional, bagian ini membahas ASEAN sebagai sebuah organisasi yang menjadi agen sosialisasi norma bagi negara anggota. Dibahas pula gambaran besar sengketa Laut China Selatan sebagai isu yang memberikan tantangan bagi ASEAN. Lebih lanjut, dipaparkan pula posisi dan respon ASEAN maupun posisi dan respon China dalam menghadapi masalah tersebut.

Bab III: Dengan menggunakan pemikiran Konstruktivisme, mencakup model mekanisme pembentukan pemahaman intersubjektif Wendt, konsep persepsi, dan konsep hubungan *patron-client*, bagian ini akan menjawab pertanyaan penelitian penulis, di mana Bab ini memberikan pemahaman atas latar belakang penolakan Kamboja terhadap posisi bersama ASEAN dalam isu Laut China Selatan.

Bab IV: Berisi kesimpulan dari penulis terkait dengan hasil pembahasan yang telah didapat.